

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Perkembangan industri keuangan syariah diawali dengan terbitnya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Implikasi positif dari kebijakan pemerintah di atas adalah banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam perkembangannya sekarang ini, ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan lembaga keuangan syariah non bank antara lain berupa Asuransi Syariah (AS), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS).

BMT merupakan sebuah lembaga nonbank yang berbentuk koperasi berbasis syariah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Walaupun dana yang dipinjamkan masih berskala kecil, cukup membantu karena pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah.

Keberadaan BMT ini mampu berkontribusi sebagai salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan bunga atau riba, sehingga masyarakat kecil dapat meningkatkan usahanya dalam berbagai bidang tanpa takut dengan bunga yang tinggi.

BMT juga memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan BMT dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka, sementara penyaluran dana dilakukan melalui pemberian pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha mikro. Sebagai lembaga kepercayaan BMT harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit yang memadai untuk melanjutkan pelayanannya dalam jangka panjang. Lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia juga berpotensi besar dalam turut serta mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Ini karena, secara karakteristik, keberadaan lembaga keuangan ini memiliki kebersenyawaan yang erat dengan sektor usaha mikro karena target dan sasaran BMT serta skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro. Namun demikian, secara umum kondisi BMT sebagai salah satu model Lembaga Keuangan Syariah (LKS) paling sederhana masih belum menemukan peran idealnya. Gampito (2008) mengatakan perkembangan BMT dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Beberapa penyebabnya adalah manajemen yang belum baik, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang tidak mampu bekerja secara

profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya, (Sumiyanto, 2008). Munculnya begitu banyak BMT di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat mendukung suatu BMT untuk dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta di lapangan menunjukkan perkembangan profit yang tidak stabil (fluktuatif) yang akan berakibat kurang maksimalnya dalam pengembangan dan peran sertanya dalam masyarakat, manajemen yang kurang baik dan sumber daya manusia yang belum memadai. Mengingat perannya yang sangat besar di dalam mendorong usaha mikro, keberadaan BMT mesti dijaga dan ditingkatkan kinerjanya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah peningkatan efisiensi BMT.

Penelitian Widiyanto and Ismail (2008) menunjukkan bahwa efisiensi BMT dalam menghasilkan keuntungan relatif rendah. Efisiensi juga menunjukkan bahwa BMT yang dioperasikan masih jauh dari skala optimal. Artinya bahwa masih ada ruang untuk perbaikan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki BMT. Walaupun hasil penelitian M. Mahbubi Ali dan Ascarya(2010) menemukan suatu BMT yang mengalami peningkatan efisiensi.

Pengukuran kinerja lembaga keuangan dapat dilakukan melalui efisiensi yang dicapai oleh lembaga keuangan pada suatu periode waktu tertentu. Penelitian menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengetahui efisiensi profitabilitas BMT se-kota Semarang perlu dilakukan. Berdasarkan informasi dari ketua Asosiasi BMT Semarang menggambarkan bahwa profitabilitas BMT di Semarang masih fluktuatif. Artinya bahwa efisiensi BMT dalam menghasilkan keuntungan juga fluktuatif.

1.2 Rumusan Masalah

BMT pada dasarnya diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat karena BMT memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oleh karena itu BMT harus dapat beroperasi secara efisiensi. Permasalahannya adalah profitabilitas BMT di Semarang masih fluktuatif. Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana efisiensi BMT se-kota Semarang dalam menghasilkan keuntungan dan melayani masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengukurtingkat efisiensi BMT se-kota Semarang dalam menghasilkan keuntungan dan melayani masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian di bidang Keuangan Syariah. Selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu manajemn khususnya dalam bidang keuangan syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi BMT

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak dan karyawan.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumangsih, atau referensi bagi peneliitian selanjutnya mengenai manajemen bidang keuangan syariah